



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan / atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 32 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut adalah Bupati Kotabaru.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Keuangan Dcsa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Pemcrintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa yang selanjutnya disebut HP Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil Pajak Daerah Kabupaten.
17. Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa yang selanjutnya disebut HR Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan basil Retribusi Daerah Kabupaten.
18. ADD, HP Desa dan HR Desa adalah 3 jenis dari beberapa jenis Pendapatan Desa dalam Kelompok Dana Tranfer pada APB Desa dibelanjakan untuk melaksanakan kewenangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enarn) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAN BESARAN SERTA PENETAPAN ADD, HP DESA DAN HR DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tujuan Khusus ADD adalah untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Tujuan Umum ADD, HP Desa dan HR Desa adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pncamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan kewaspadaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3

Pengelolaan ADD, HP Desa dan HR Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan kcuangan desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD, HP Desa dan HR Desa harus tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa serta ditetapkan dalam APB Desa tahun berjalan.

Bagian Kedua Sumber dan Besaran

Pasal 5

- (1) ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten, kecuali Dana Alokasi Khusus.
- (2) HP Desa berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (3) HR Desa berasal dari Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Besaran HP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diperuntukan bagi desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah pertahun.
- (3) Besaran HR Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diperuntukan bagi desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan Retribusi Daerah per tahun.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 7

- (1) Anggaran ADD, HP Desa dan HR Desa untuk tahun 2016 dialokasikan sebesar sebagai berikut :
 - a. ADD sebesar Rp. 111.665.336.148,- (seratus sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Alokasi HP Desa Rp. 3.180.078.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. HR Desa Rp. 2.048.043.000,- (dua milyar empat puluh delapan juta empat puluh tiga ribu rupiah).

- (2) Penetapan rincian ADD, HP Desa dan HR Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) ADD ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal (ADDM) dan ADD Proposional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang diperhitungkan dengan rumus lambang persentase atau dengan koefisien variabel, yang selanjutnya disebut ADDV.

- (2) Persentase perhitungan pembagian ADD untuk ADDM sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dan ADDV sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

- (3) Rumus Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagai berikut :

$$ADDx = ADDMx + (BDx \times ADDV)$$

Dimana :

ADDx : Besaran Bagian ADD masing-masing desa

ADDMx : 60% dari ADD dibagi Jumlah Desa se
Kabupaten

BDx : Bobot Desa per desa

ADDV : 40% dari ADD

ADD : $ADDM + ADDV (60\% \times ADD + 40\% \times ADD)$

- (4) Variabel Independen yang dipergunakan untuk menentukan Bobot Desa adalah :

- a. Jumlah Keluarga Miskin Desa;
- b. Jumlah Penduduk Desa;
- c. Luas Wilayah Desa;
- d. Indeks Kesulitan Geografis

- (5) Bobot desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variable dengan rumus sebagai berikut :

$$BD \text{ desa } I = (a \times KV1) + (b \times KV2) + (c \times KV3) + (d \times KV4)$$

- (6) Lambang a, b, c dan d pada rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan jumlah dari hasil pembobotan yang diperhitungkan dari jumlah masing-masing Variabel Independen dibagi jumlah Variabel Kabupaten.

- (7) Sabot untuk masing-masing Koefisien Variabel adalah $0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 1$, dengan ketentuan 0.4 (KV1) untuk variable independen Jumlah Keluarga Miskin Desa, 0.3 (KV2) untuk variable independen jumlah penduduk dcsa, 0.2 (KV3) untuk variable independen Luas Wilayah Desa dan 0.1 (KV4) untuk variable independen Indeks kesulitan Geografis.

Pasal 9

Untuk pembagian HP Desa untuk setiap desa dipakai rumus sebagai berikut :

$$\text{HP Desa 1} = \frac{\text{HP Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$$

Dimana :

HP Desa 1 : Besaran Bagian HPDesa masing-masing desa

Jumlah Desa = Jumlah desa dalam daerah

HP Desa : Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah untuk desa
(10 % X Bagi Hasil Pajak daerah untuk Desa)

Pasal 10

(1) HRDesa ditetapkan berdasarkan jumlah HR Desa Minimal (HRDM) dan HRD Proporsional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang diperhitungkan dengan rumus lambang persentase atau dengan koefisien variabel, yang selanjutnya disebut HRDP.

(2) Persentase perhitungan pembagian HR Desa untuk HRDM sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dan HRDP sebesar 60 % (enam puluh per seratus).

(3) Rumus Pembagian HR Desa untuk setiap desa sebagai berikut:

$$\text{HRDesa } i = \text{HRDM } i + (\text{BD } i \times \text{HRDP})$$

Dimana :

HR Desa i : Besaran Bagian Bagi Hasil Retribusi untuk masing-masing desa

HRDM i : 40 % dari HRDesa dibagi Jumlah Desa se Kabupaten

BD i : Bobot Desa per desa

HRDP : 60 % dari HRDesa

HR Desa : HRDM + HRDP (40 % X HRDesa + 60% X HRDesa)

(4) Variabel independen yang dipergunakan menentukan bobot desa adalah :

- a. jumlah keluarga miskin desa;
- b. jumlah penduduk desa;
- c. luas wilayah desa; dan
- d. Indeks Kesulitan Geografis.

- (5) Bobot desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variable dengan rumus sebagai berikut :
- $$BD \text{ desa I} = (a \times KV1) + (b \times KV2) + (c \times KV3) + (d \times KV4)$$
- (6) Latnbang a, b, c dan d pada rumus seba.gaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan jumlah dan hasil pembobotan yang diperhitungkan dan jumlah masing-masing Variabel Independen dibagi jumlah Variabel Kabupaten.
- (7) Bobot untuk masing-masing Koefisien Variabel adalah $0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 1$, dengan ketentuan 0.4 (KV1) untuk variable independen Jumlah Keluarga Miskin Desa, 0.3 (KV2) untuk variable independen jumlah penduduk desa, 0.2 (KV3) untuk variable independen Luas Wilayah Desa dan 0.1 (KV4) untuk variable independen Indeks Kesulitan Geografis.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD, HP DESA DAN HR DESA

Bagian Kesatu Mekanismc Pencairan

Pasal 11

- (1) ADD, HP Desa dan HR Desa yang tertuang dalam APB Desa dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada BPKAD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, HP Desa dan HR Desa secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala DPMPD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPMPD untuk selanjutnya meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD akan menyalurkan langsung dan Kas Daerah ke rekening Desa, dengan memberitahukan data jumlah dana dan nama desa yang mencria transfer.

Pasal 12

- (1) Lampiran berkas permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), sebagai berikut :

- a. surat permohonan Kepala Desa;
 - b. surat rekomendasi/pengantar Camat
 - c. Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya, untuk permohonan awal;
 - d. RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - e. APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahap I;
 - g. desain/gambar sederhana proyek fisik untuk tahap II;
 - h. fotocopy RIO dan saldo RKID;
 - i. foto 0 % (nol per seratus) lokasi dan fisik proyek untuk tahap I;
 - j. foto 35 % (tiga puluh lima per seratus) fisik untuk tahap II; dan
 - k. Laporan Semester Realisasi Fisik dan Keuangan.
- (2) Apabila kepala desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan Dana Alokasi Desa dapat dilakukan oleh pejabat kepala desa atau sekretaris desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Pencairan dana pada rekening desa oleh bendahara desa sesuai kebutuhan dengan membawa surat perintah Kepala Desa dan rekomendasi/pengantar Camat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank yang di tetapkan dengan tembusan Kepala DPMPD.

Pasal 14

Penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dan diatur sebagai berikut :

- a. tahap pertama, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total anggaran dilakukan pada Bulan Maret setelah memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- b. tahap kedua, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) sisa dari total jumlah anggaran dilakukan pada Bulan Juli setelah DPMPD menerima laporan APBDes Semester Pertama dari Pemerintah Desa melalui Camat.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 15

Penggunaan anggaran ADD, HP Desa dan HR Desa terintegrasi dengan APB Desa dituangkan dalam RPJM Desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah terdiri dari :

- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. pendataan desa;
- c. penyusunan tata ruang desa
- d. penyelenggaraan musyawarah desa;
- e. pengelolaan informasi desa
- f. penyelenggaraan perencanaan desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa;
- h. penyelenggaraan ketjasama antar desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- j. termasuk belanja pegawai serta pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, atau sesuai kondisi desa.

Pasal 17

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah terdiri dari :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Kcmasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi desa

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. pelatihan usaha ciconomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat seperti kader pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha elonomi produktif, kelompok tani/nclayan/kelompok pengrajin, kelompok pemuda/perempuan.

Pasal 20

Khusus penerimaan desa yang bersumber dari ADD dialokasikan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan perhitungan diatur sebagai berikut

- a. maksimal 60 % (enam puluh per seratus) dari ADD masing-masing dcsa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun setelah dihitung berdasarkan kententuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi jumlah Perangkat Desa se Kabupaten berdasarkan prosentasc tiap jenjang jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak terjadi perbedaan penghasilan sesama kepala desa, sesama kepala dusun dan sesama kepala-kepala urusan di Desa se Kabupaten;

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pcnanggungjawab, dapat dijabat oleh Camat,
 - b. Ketua, dapat dijabat oleh Sekretaris Camat;
 - c. Sekretaris dapat dijabat oleh Kasi Ekobang, Kasi Pemerintahan atau Kasi PMD;
 - d. Anggota terdiri dari Kasi Ekobang, Kasi PMD, Kasi Pcmerintahan, Kasi Trantib, Kasi Kemasyarakatan, Kaur Perencanaan dan Keuangan dan Bendahara atau dapat diambil dari pendamping desa profesional.
- (³) Dalam hal tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, Camat dapat menunjuk pejabat lain yang ada di lingkup kecamatannya.
- (4) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memberikan bimbingan dan fasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan fasilitasi pembuatan rancangan APB Desa;
 - c. memberikan bimbingan dan fasilitasi penatausahaan keuangan desa yaitu meliputi buku kas umum, BKP, buku kas pajak dan buku bank;
 - d. memberikan bimbingan dan fasilitasi pembuatan laporan realisasi pelaksanaan DAD semester pertama dan semester akhir tahun serta pertanggungjawaban APB Desa;
 - e. melakukan pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan DAD yang sudah di verifikasi oleh sekretaris desa dan hasilnya dilaporkan kepada Camat;
 - L melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan fisik dan non fisik penggunaan DAD dan melaporkan hasilnya kepada camat;
 - g. menyampaikan surat permohonan dan laporan kepada Bupati melalui DPMPD dengan perintah camat yaitu:
 1. permintaan penyaluran DAD oleh Desa;
 2. laporan pencairan DAD yang dicairkan oleh Desa; dan
 3. laporan realisasi pelaksanaan DAD.

- h. Membrikan surat rekomendasi pencairan DAD oleh bendahara desa yang ditandatangani camas atau ketua Tim Pendamping dalam hal camat berhalangan atas pertimbangan dasar laporan hasil verifikasi SPJ scbelumnya dan basil monitoring penggunaan DAD yang dilakukan olch Tim Pendamping.
- (5) Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran beijalan meialui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPD.

- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan diluar anggaran ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah kecamatan bersangkutan.

Bagian Kcdua Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, HP Dcsa dan HR Desa, meliputi :

- a. pengawasan di lakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa dalam pertanggungjawaban dalam rangka peningkatkan kincrja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka transparansi dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa;
- c. pengawasan camat dilakukan dalam rangka memastikan agar pelaksanaan pngelolaan dalam wilayah kecamatan bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

c. Surat Tugas Bendahara Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 1 Januari 2018
BUPATI KOTABARU,

AYE JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 1 Januari 2018
S KR ARTS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SAID AKHMAD

PARAF KOORDIN

1



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAPADA
DESA SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAN RETREBUSI UNTUK DESA SE KABUPATEN KOTABARU
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Nama /Jumlah | | Alokasi Dana Desa | Bagi Basil Retribusi Daerah Untuk Desa | Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa | Dana Alokasi Desa | 60%, 50%, 40% den 30% dad ADD untuk Siltap | ICet | |
|----|--------------------|------|----------------------|--|--|-------------------|--|----------------|--|
| | Keetunatim | Desa | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-14+5+6) | 8 | 9 | |
| 1 | Pulau Sembilan | 1 | LABUAN BARAT | 702.701.119,00 | 13.712.966,00 | 16.414.000,00 | 732.828.085,00 | 316.215.503,55 | |
| | | 2 | TELUK SUNGAI | 780.991.416,00 | 15.667.873,00 | 16.414.000,00 | 813.073.289,00 | 351.446.137,20 | |
| | | 3 | MARADAPAN | 842.459.027,00 | 17.645.551,00 | 16.414.000,00 | 876.518.578,00 | 379.106.562,15 | |
| | | 4 | TENGAH | 928.740.174,00 | 19.478.630,00 | 16.414.000,00 | 964.632.804,00 | 278.622.052,20 | |
| | | 5 | TANJUNGYIUR | 985.109.088,00 | 20.125.139,00 | 16.414.000,00 | 1.021.648.227,00 | 295.532.726,40 | |
| 2 | Pulau Laut Barat | 1 | LONTAR SELATAN | 449.509.720,00 | 8.698.512,00 | 16.414.000,00 | 474.622.232,00 | 269.705.832,00 | |
| | | 2 | LONTAR TIMUR | 729.684.748,00 | 14.609.656,00 | 16.414.000,00 | 760.708.404,00 | 328.358.136,60 | |
| | | 3 | SEBANTI | 512.389.002,00 | 10.389.982,00 | 16.414.000,00 | 539.192.984,00 | 256.194.501,00 | |
| | | 4 | SEPAGAR | 492.837.047,00 | 10.304.047,00 | 16.414.000,00 | 519.555.094,00 | 295.702.228,20 | |
| | | 5 | SEMARAS | 560.568.597,00 | 10.394.994,00 | 16.414.000,00 | 587.377.591,00 | 280.284.298,50 | |
| | | 6 | TERANGKEH | 553.725.769,00 | 10.999.605,00 | 16.414.000,00 | 581.139.374,00 | 276.852.884,50 | |
| | | 7 | GEMURUH | 511.418.819,00 | 10.408.859,00 | 16.414.000,00 | 538.241.678,00 | 255.709.409,50 | |
| | | 8 | TAPIAN BALAI | 483.575.878,00 | 9.945.878,00 | 16.414.000,00 | 509.935.756,00 | 290.145.526,80 | |
| | | 9 | LONTAR UTARA | 543.222.365,00 | 10.412.406,00 | 16.414.000,00 | 570.048.771,00 | 271.611.182,50 | |
| | | 10 | SUMBER SARI | 449.581.431,00 | 8.940.558,00 | 16.414.000,00 | 474.935.989,00 | 269.748.858,60 | |
| | | 11 | SUBUR MAKMUR | 493.079.402,00 | 9.871.026,00 | 16.414.000,00 | 519.364.428,00 | 295.817.641,20 | |
| 3 | Pulau Laut Selatan | 1 | TELUK SIRIH | 696.016.417,00 | 14.365.246,00 | 16.414.000,00 | 726.795.663,00 | 348.008.208,50 | |
| | | 2 | SUNOAI BAHIM | 613.498.969,00 | 12.618.873,00 | 16.414.000,00 | 642.531.842,00 | 306.749.484,50 | |
| | | 3 | TANJUNG SELOKA | 814.725.765,00 | 15.346.027,00 | 16.414.000,00 | 846.485.792,00 | 366.626.594,25 | |
| | | 4 | TANJUNG SERUDUNG | 668.335.000,00 | 12.882.827,00 | 16.414.000,00 | 697.631.827,00 | 334.167.500,00 | |
| | | 5 | ALLE-ALLE | 613.521.497,00 | 12.558.976,00 | 16.414.000,00 | 642.494.473,00 | 306.760.748,50 | |
| | | 6 | SUNGAI BULAN | 506.618.166,00 | 9.967.094,00 | 16.414.000,00 | 532.999.260,00 | 253.309.083,00 | |
| | | 7 | LABUAN MM | 841.566.520,00 | 17.619.395,00 | 16.414.000,00 | 875.599.915,00 | 378.704.934,00 | |
| | | 8 | TANJUNG SELOKA UTARA | 655.704.976,00 | 12.784.755,00 | 16.414.000,00 | 684.903.731,00 | 327.852.488,00 | |

| No | Nama /Jurnlah | | Alokasi Dana Den | Bagi Hail Retribusi Daerah Untuk Desa | Bagi Basil Pajak Daerah Untuk Desa | Dana Alokasi Den | 60%, 50%, 40% dan 30% dari ADD untuk Siltap | Ket | |
|----|------------------|------|---------------------|---|--|------------------|---|----------------|--|
| | Kecamatan | Desa | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-14+5+6) | 8 | 9 | |
| 4 | Pulau Lout Timur | 1 | BATU TUNAU | 104.788.937,00 | 13.029.058.00 | 16.414.000.00 | 734.231.990.00 | 317.155.019.40 | |
| | | 2 | SEJAICAH | 595.706.916,00 | 10.621.446.00 | 16.414.000,00 | 622.742.362.00 | 297.853.458,00 | |
| | | 3 | BEKAMBIT | 499.553.182,00 | 9.088.173.00 | 16.414.000.00 | 525.055.355.00 | 299.731.909.20 | |
| | | 4 | LANOKANG BARU | 473.278.530,00 | 8.782.957.00 | 16.414.000.00 | 498.475.487.00 | 283.967.118.00 | |
| | | 5 | LANOICANG LAMA | 431.006.160,00 | 8.184.828.00 | 16.414.000,00 | 455.604.988,00 | 258.603.696.00 | |
| | | 6 | SUNOAI LIMAU | 423.062.976,00 | 8.128.939.00 | 16.414.000.00 | 447.605.915.00 | 253.837.785.60 | |
| | | 7 | BERANGAS | 402.979.064,00 | 7.669.129.00 | 16.414.000.00 | 427.062.193.00 | 241.787.438.40 | |
| | | 8 | TAKJUNGPENGGHARAPAN | 611.424.134,00 | 12.457.849.00 | 16.414.000.00 | 640.295.983.00 | 305.712.067,00 | |
| | | 9 | BETUNG | 486.842.089,00 | 9.225.958.00 | 16.414.000.00 | 512.482.047.00 | 292.105.253,40 | |
| | | 10 | TELUK MESJID | 460.609.324,00 | 8.813.746.00 | 16.414.000,00 | 485.837.070.00 | 276.365.594,40 | |
| | | 11 | TELUK GOSONG | 528.895.005,00 | 10.439.936.00 | 16.414.000.00 | 555.748.941,00 | 264.447.502,50 | |
| | | 12 | KULIPAK | 424.879.060,00 | 8.422.212.00 | 16.414.000,00 | 449.715.272.00 | 254.927.436,00 | |
| | | 13 | KARANGSARI INDAH | 452.143.187,00 | 9.145.319.00 | 16.414.000.00 | 477.702.506.00 | 271.285.912.20 | |
| | | 14 | BEKAMBIT ASRI | 450.196.790,00 | 8.651.174.00 | 16.414.000.00 | 475.261.964.00 | 270.118.074.00 | |
| 5 | Pulau Sebuku | 1 | SEICAPUNG | 557.038.791,00 | 10.481.679,00 | 16.414.000.00 | 584.434.476.00 | 278.769.398.50 | |
| | | 2 | KANIBUNOAN | 447.344.194,00 | 8.765.840.00 | 16.414.000,00 | 472.524.034,00 | 268.406.516.40 | |
| | | 3 | MANDIN | 436.042.427,00 | 8.684.097,00 | 16.414.000,00 | 461.140.524,00 | 261.625.456.20 | |
| | | 4 | SERAICAMAN | 430.147.383,00 | 8.078.613,00 | 16.414.000.00 | 454.639.996.00 | 258.088.429,80 | |
| | | 5 | SUNGAI BALI | 464.844.856,00 | 8.410.156,00 | 16.414.000.00 | 489.669.012.00 | 278.906.913.60 | |
| | | 6 | BALAMBUS | 402.653.223,00 | 8.203.204.00 | 16.414.000.00 | 427.270.427.00 | 241.591.933.80 | |
| | | 7 | RAMPA | 477.834.667,00 | 9.233.118,00 | 16.414.000.00 | 503.481.785.00 | 286.700.800.20 | |
| | | 8 | UJUNG | 413.243.744,00 | 8.245.112.00 | 16.414.000.00 | 437.902.856.00 | 247.946.246.40 | |
| 6 | Pulau Laut Utara | 1 | MEGASARI | 469.574.457,00 | 8.824.008.00 | 16.414.000.00 | 494.812.465,00 | 281.744.674.20 | |
| | | 2 | SEBELIMBINOAN | 445.478.260,00 | 8.079.896.00 | 16.414.000.00 | 469.972.156.00 | 267.286.956.00 | |
| | | 3 | STAGEN | 560.576.341,00 | 8.456.354.00 | 16.414.000,00 | 585.446.695,00 | 280.288.170,50 | |
| | | 4 | RAMPA | 1.532.621.168,00 | 29.690.522.00 | 16.414.000.00 | 1.578.725.690,00 | 459.786.350.40 | |
| | | 5 | SUNGAI TAIB | 500.547.567,00 | 8.152.647.00 | 16.414.000.00 | 525.114.214,00 | 250.273.783,50 | |
| | | 6 | SEMAYAP | 1.110.200.016,00 | 12.536.413.00 | 16.414.000,00 | 1.139.150.429,00 | 333.060.004,80 | |
| | | 7 | DIROAHAYU | 901.377.229,00 | 11.643.748.00 | 16.414.000,00 | 929.434.977,00 | 270.413.168,70 | |
| | | 8 | SEBATUNO | 474.341.506,00 | 8.739.067.00 | 16.414.000,00 | 499.494.573.00 | 284.604.903.60 | |
| | | 9 | BAHARU UTARA | 676.304.264,00 | 10.797.304.00 | 16.414.000,00 | 703.515.568.00 | 338.152.132.00 | |
| | | 10 | TIRAWAN | 442.902.314,00 | 8.414.453,00 | 16.414.000.00 | 467.730.767.00 | 265.741.388.40 | |
| | | 11 | HIUR MUARA | 702.467.713,00 | 11.172.933,00 | 16.414.000,00 | 730.054.646,00 | 316.110.470.85 | |
| | | 12 | SIOAM | 451.089.979,00 | 7.835.813,00 | 16.414.000.00 | 475.339.792.00 | 270.653.987.40 | |
| | | 13 | SARANG TIUNG | 760.841.363,00 | 13.908.358,00 | 16.414.000,00 | 791.163.721,00 | 342.378.613,35 | |
| | | 14 | GUNUNG ULIN | 521.637.076,00 | 9.466.344,00 | 16.414.000.00 | 547.517.420,00 | 260.818.538.00 | |
| | | 15 | GEDAMBAAN | 532.873.944,00 | 10.370.339.00 | 16.414.000,00 | 559.658.283,00 | 266.436.972,00 | |
| | | 16 | GUNUNG SARI | 448.854.086,00 | 8.247.262.00 | 16.414.000.00 | 473.515.348.00 | 269.312.451.60 | |
| | | 17 | BATUAH | 543.816.153,00 | 9.338.145,00 | 16.414.000.00 | 569.568.298.00 | 271.908.076.50 | |
| | | 18 | Tunianean RT Kel | 235.200.000,00 | | | 235.200.000.00 | | |

| No | Names /Jumlah | | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa | Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa | Dana Alokasi Desa | 60%, 50%, 40% den 30% dari ADD untuk Siltap | Ket |
|----|-------------------|---|--|---|---|--|--|-----|
| | Kecamatan | Desa | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-(4+5+6) | 8 | 9 |
| 7 | Kelumpang Selatan | 1 TANJUNG PANGGA 2 PEMBELACANAN 3 SUNOAI NIPAH 4 PANTAI 5 SANOKINO BARU 6 SUKA MAJU 7 SUNGAI KUPANG JAYA 8 PANTAI BARU 9 BUMI ASIH | 484.845.034,00 428.195.150,00 455.517.727,00 645.838.035,00 509.081.485,00 418.019.042,00 431.435.461,00 411.530.967,00 405.611.228,00 | 10.054.521,00 8.469.897,00 8.802.299,00 10.902.868,00 9.237.240,00 7.800.653,00 7.959.028,00 7.894.482,00 7.741.427,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 511.313.555,00 453.079.047,00 480.734.026,00 673.154.903,00 534.732.725,00 442.233.695,00 455.808.489,00 435.839.449,00 429.766.655,00 | 290.907.020,40 256.917.090,00 273.310.636,20 322.919.017,50 254.540.742,50 250.811.425,20 258.861.276,60 246.918.580,20 243.366.736,80 | |
| 8 | Kciumngang Hulu | 1 CANDLING KIRI HILIR 2 KARANO PAYAU 3 BANUA LAWAS 4 SUNGAI KUPANG 5 BANGKALAN MELAYU 6 BANOKALAN DAYAK 7 LABURAN 8 KARANG LIWAR 9 MANOKIRANA 10 SIDOMULYO | 476.166.783,00 542.307.867,00 449.855.421,00 648.088.250,00 637.727.305,00 617.742.117,00 477.975.045,00 480.022.012,00 408.699.894,00 461.386.381,00 | 8.811.171,00 10.598.086,00 8.558.182,00 9.777.100,00 11.479.350,00 10.997.002,00 9.602.284,00 9.003.612,00 8.382.049,00 8.445.641,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 501.391.954,00 569.319.953,00 474.827.603,00 674.279.350,00 665.620.655,00 645.153.119,00 503.991.329,00 505.439.624,00 433.495.943,00 486.246.022,00 | 285.700.069,80 271.153.933,50 269.913.252,60 324.044.125,00 318.863.652,50 308.871.058,50 286.785.027,00 288.013.207,20 245.219.936,40 276.831.828,60 | |
| 9 | Kelumpang Tengah | 1 TANJUNG BATU 2 SUNGAI PUNGOAWA 3 TANAH RATA 4 SEBULI 5 SEMBILANG 6 TAMIANG BAKUNG 7 SANG-SANG 8 SUNGAI PINANG 9 TANJUNG SELAYAR 10 SENAKIN SEBERANG 11 SENAKIN 12 TEEING TINGGI 13 OBRONGOANG | 420.833.173,00 415.089.039,00 407.566.173,00 445.721.467,00 535.256.776,00 473.986.348,00 571.174.277,00 404.460.157,00 391.875.591,00 424.187.268,00 412.819.169,00 420.481.778,00 571.788.935,00 | 7.899.898,00 8.248.786,00 8.416.464,00 8.895.289,00 10.548.242,00 8.555.009,00 9.617.431,00 8.273.498,00 8.066.836,00 8.473.778,00 7.889.363,00 8.152.012,00 9.455.799,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 445.147.071,00 439.751.825,00 432.396.637,00 471.030.756,00 562.219.018,00 498.955.357,00 597.205.708,00 429.147.655,00 416.356.427,00 449.075.046,00 437.122.532,00 445.047.790,00 597.658.734,00 | 252.499.903,80 249.053.423,40 244.539.703,80 267.432.880,20 267.628.388,00 284.391.808,80 285.587.138,50 242.676.094,20 235.125.354,60 254.512.360,80 247.691.501,40 252.289.066,80 285.894.467,50 | |
| 10 | Kelumpang Utara | 1 SUNGAI HANYAR 2 SUNGAI SELUANG 3 PUDI 4 MANOGA 5 WILAS 6 PUDI SEBERANG 7 SULANGKIT | 491.347.485,00 474.745.961,00 473.470.116,00 529.035.875,00 488.947.185,00 543.631.310,00 435.155.469,00 | 9.771.580,00 9.166.597,00 8.780.365,00 10.243.925,00 9.729.571,00 10.557.759,00 9.085.594,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 517.533.065,00 500.326.558,00 498.664.481,00 555.693.800,00 515.090.756,00 570.603.069,00 460.655.063,00 | 294.808.491,00 284.847.576,60 284.082.069,60 264.517.937,50 293.368.311,00 271.815.655,00 261.093.281,40 | |

| No | Name /Jumlah | | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Den | Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa | Dana Alokasi Desa | 60%, 50%, 40% dan 30% dari ADD untuk Siltap | Ket |
|----|-----------------|---|---|--|---|--|--|-----|
| | Kecamatan | Desa | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-(4+5+6) | 8 | 9 |
| 11 | Pamukan Selatan | 1 SEKANDIS 2 GUNUNG CALANG 3 TALUSI 4 SAKALIMAU 5 TANJUNG SAMALANTAKAN 6 SAKADOYAN 7 RAMPA CENGAL 8 SESULUNG 9 PONDOK LABU 10 MULYODADI 11 SUKADANA | 473.972.116,00 470.185.487,00 467.088.890,00 423.619.198,00 500.417.261,00 440.664.964,00 589.699.835,00 566.650.566,00 524.647.153,00 394.784.365,00 473.589.647,00 | 9.166.256,00 8.493.554,00 9.188.491,00 8.841.495,00 9.041.282,00 8.685.702,00 10.721.440,00 10.133.324,00 9.161.139,00 8.297.540,00 9.415.850,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 499.552.372,00 495.093.041,00 492.691.381,00 448.874.693,00 525.872.543,00 465.764.666,00 616.835.275,00 593.197.890,00 550.222.292,00 419.495.905,00 499.419.497,00 | 284.383.269,60 282.111.292,20 280.253.334,00 254.171.518,80 250.208.630,50 264.398.978,40 294.849.917,50 283.325.283,00 262.323.576,50 236.870.619,00 284.153.788,20 | |
| 12 | Sampanahan | 1 SEPAPAFI 2 SUNGA1BETUNG 3 BASUANG 4 GUNUNG BATU BESAR 5 SAMPANAHAN 6 RAMPA MANUNGGUL 7 PAPAAN 8 SAMPANAHAN HILIR 9 BANJAR SARI 10 SUKA MAJU | 424.441.218,00 486.437.777,00 512.367.283,00 516.473.956,00 491.479.793,00 735.997.475,00 433.596.188,00 686.846.266,00 423.865.159,00 492.882.416,00 | 8.779.815,00 9.912.012,00 10.525.592,00 9.363.481,00 8.733.816,00 15.167.840,00 8.590.640,00 11.838.584,00 8.133.991,00 8.494.993,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 449.641.033,00 512.763.789,00 539.306.875,00 542.251.437,00 516.627.609,00 767.579.315,00 458.600.828,00 715.098.850,00 448.413.150,00 517.791.409,00 | 254.668.330,80 291.862.666,20 256.183.641,50 258.236.978,00 294.887.875,80 331.198.863,75 260.157.712,80 343.423.133,00 254.319.095,40 295.729.449,60 | |
| 13 | Pamukan Utara | 1 BEPARA 2 BETUNG 3 SEKAYU BARU 4 BAKAU 5 BINTURUNG 6 HARAPAN BARU 7 BALAIMEA 8 TAMIANG 9 KAMAN 10 MULYOHARJO 11 PAMUKANINDAH 12 WONOREJO 13 LINTANG JAYA | bbts.12b.3 9,00 472.030.299,00 476.525.102,00 576.605.291,00 696.745.234,00 470.475.925,00 466.234.868,00 425.382.661,00 419.119.019,00 412.906.732,00 401.551.646,00 410.350.670,00 413.108.185,00 | 10.030.133,00 8.965.918,00 9.140.261,00 9.810.591,00 10.933.642,00 8.717.016,00 8.786.842,00 8.338.011,00 8.022.955,00 7.754.979,00 7.969.136,00 8.030.554,00 7.815.556,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 592.570.492,00 497.410.217,00 502.079.363,00 602.829.882,00 724.092.876,00 495.606.941,00 491.435.710,00 450.134.672,00 443.555.974,00 437.075.711,00 425.934.782,00 434.795.224,00 437.337.741,00 | 283.063.179,50 283.218.179,40 285.915.061,20 288.302.645,50 348.372.617,00 282.285.555,00 279.740.920,80 255.229.596,60 251.471.411,40 247.744.039,20 240.930.987,60 246.210.402,00 247.864.911,00 | |

| No | Nama /Jumlah | | Alokasi Dana Desa | Bagi Basil Retribusi Daerah Untuk Desa | Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Dna | Dana Alokasi Den | 60%, 50%, 40% dan 30% dari ADD untuk Siltap | Ket |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----|
| | Kecamatan | Desa | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-(4+5+6) | 8 | 9 |
| 14 | Hampang | 1 HAMPANG 2 CANTUNG lam HULU 3 CANTUNG KANAN 4 mUARA ORIE 5 LALAPIN 6 PERAMASAN DUA KALI 7 LIMBUR 8 HULU SAMPANAHAN 9 LIMBUNGAN | 628.193.312,00 781.163.029,00 540.976.320,00 1.082.930.279,00 659.669.766,00 649.360.318,00 782.608.333,00 567.235.629,00 713.407.594,00 | 11.709.253.00 14.328.501.00 9.538.188.00 21.697.868.00 11.499.976,00 12.531.760,00 14.473.462.00 10.894.246.00 14.236.283.00 | 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000.00 | 656.316.565.00 811.905.530.00 566.928.508.00 1.121.042.14740 687.583.742.00 678.306.078.00 813.495.795.00 594.543.875.00 744.057.877.00 | 314.096.656.00 351.523.363,05 270.488.160,00 324.879.083.70 329.834.883.00 324.680.159.00 391.304.166.50 283.617.814.50 356.703.797.00 | |
| 15 | Sungai Dorian | 1 BULUH KUNING 2 GENDANG TIMBUru 3 MANUNGGAL LAMA 4 RANTAU BUDHA 5 MANUNGGUL BARU 6 TEROBONG SARI 7 RANTAU JAYA | 906.021.390,00 1.005.719.877,00 709.311.887,00 514.180.575,00 424.689.481,00 451.007.255,00 423.653.495,00 | 16.602.503.00 16.988.442.00 11.290.689,00 9.062.631.00 8.341.787.00 8.788.378,00 7.936.741.00 | 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 | 939.037.893.00 1.039.122.319.00 737.016.576.00 539.657.206.00 449.445.268.00 476.209.633,00 448.004.236.00 | 271.806.417.00 301.715.963,10 319.190.349.15 257.090.287.50 254.813.688.60 270.604.353.00 254.192.097.00 | |
| 16 | Palau Laut Tengah | 1 SEMISIR 2 SUNGAIPASIR 3 MEKARPURA 4 SELARU 5 SUNGUP KANAN 6 PANTAIBARU 7 SALIN° | 743.11.50.747,UKr 793.147.273,00 548.610.568,00 516.271.950,00 464.002.953,00 523.579.225,00 563.945.749,00 | 14.117.951.00 13.785.888,00 9.134.694,00 9.623.527.00 8.909.733.00 9.648.666.00 10.320.800.00 | 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000,00 16.414.000.00 | 773.582.692,00 823.347.161.00 574.159.262.00 542.309.477.00 489.326.686.00 549.641.891.00 590.680.549.00 | 334.372.833,45 356.916.272.85 274.305.284.00 258.135.975.00 278.401.771.80 261.789.612.50 281.972.874.50 | |
| 17 | Kelumpang Hilir | 1 SERONGGA 2 TARJUN 3 LANGADAI 4 PULAU PANCI 5 PELAJAU BARU 6 TEGAL REJO 7 MANDALA 8 TELAOASARI 9 SAHAPI | 53.3.783.619,00 615.591.961,00 545.221.274,00 551.726.261,00 472.267.489,00 704.128.907,00 467.956.768,00 448.681.019,00 424.394.933,00 | 8.892.235.00 9.186.781.00 9.722.400.00 9.939.373.00 8.119.187.00 10.392.209.00 9.000.314.00 8.205.749.00 8.488.115.00 | 16.414.000,00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000,00 16.414.000.00 16.414.000,00 16.414.000.00 | 559.089.854.00 641.192.742,00 571.357.674.00 578.079.634.00 496.800.676.00 730.935.116,00 493.371.082,00 473.300.768,00 449.297.048.00 | 266.891.809.50 369.355.176.60 272.610.637.00 275.863.130.50 283.360.493.40 422.477.344,20 280.774.060.80 269.208.611,40 254.636.959.80 | |
| 18 | Celumpang Barat | 1 SIAYeli 2 BUNGKUKAN 3 BATANG KULUR 4 TANJUNG SARI 5 MAGALAU HILIR 6 MAGALAU HULU | 2.205.882,00 521.081.914,00 502.137.780,00 421.976.139,00 531.040.267,00 496.134.874,00 | 9.688.998.00 9.028.177,00 9.486.955,00 7.897.304.00 9.935.112.00 8.809.730.00 | 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 16.414.000.00 | 598.308.880,00 546.524.091.00 528.038.735.00 446.287.443.00 557.389.379.00 521.358.604.00 | 286.102.941.00 260.540.957.00 251.068.890.00 253.185.683.40 265.520.133,50 297.680.924.40 | |

| Rode Rekening | Uraian | Nomor dan tanggal bukti pcnyaluran ISP2D)* | Uraian Output | Volume Output | Cara Pengarlam% | Anggaran Rp. | Renee= Penggunaan Tahap I Rp. | Reelisasi | | | | Saldo Rp. | % Capaian Output | | | Keterangan | |
|---------------|--|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------|-------|---|-----------|------------------|----------|-------|------------|--|
| | | | | | | | | Tali= I Rp. | Tahap II | Total | % | | Tahap I | Tahap II | Total | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | 11 | | | 12 | |
| 2 2 2 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 3 | Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 3 | Bidang Pembinaan Kcmasyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 3 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 3 3 | Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 4 1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 4 2 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 4 3 | Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMIAH BELANJA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 1 | SILPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 2 | Penyertaan Modal Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J13MIAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMIAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAANI | | | | | | | | | | | | | | | | |

BENDAI1ARA DESA,

.....

Disetujui olch,
KEPALA DESA,

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA ALOKASI DESA

| No. | Uraian |
|-----|---|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Alokasi Desa |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan Nomor dan tanggal bukti penyaluran (SP2D) Dana Alokasi Desa dan kabupaten ke desa |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan Uraian Output, Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll. |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan Jumlah Volume Output yang terdiri jumlah dan sasaran output. Misal: 500 meter |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan cars pengadaan. Misal: Swakelola |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan jumlah anggaran |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan jumlah rencana penggunaan anggaran tahap I |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi |
| 10 | Kolom 10 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 11 | Kolom 11 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan can : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%. |
| 12 | Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) |

Catatan :

Untuk Penyaluran Dana Alokasi Desa Tahap I diisi kolom 1 s/d 8 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Alokasi Desa Tahap I sebesar 50%

ATI KOTABARU,
LtBUP

.SAY **JAFAR**

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA, 13AGI BASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN
 KOTABARU TAHUN ANGOARAN 2018

**REKAPITULAS1 LAPORAN RELISASI PENYALURAN DANA ALOKASI DESA DAR1RKUD KE RKD
 KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU
 TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | PENYALURAN KEDESA | PAGU DESA | PENYALURAN | | | | | | TOTAL PENYALURAN | SISA | DALAM PERSENTASE |
|----|-------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------------|------------|------------------|
| | | | TAHAP I | | | TAHAP II | | | | | |
| | | | NOMOR SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | NOMOR SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.6+9 | 11 •3 - 10 | 12 |
| 1 | DESA A | 100.000.000 | | | 60.000.000 | | | 10.000.000 | 100.000.000 | - | 100% |
| | Penyaluran Pertama | | 01/BPICAD | 31 Maret | 40.000.000 | 01/BPKAD | 31 Agustus | 20.000.000 | | | |
| | Penyaluran Kedua | | 02/BPICAD | 2 April | 20.000.000 | 02/BPICAD | 2 September | 20.000.000 | | | |
| 2 | DESA B | 200.000.000 | | | 120.000.000 | | | 70.000.000 | 190.000.000 | 10.000.000 | 95,00% |
| | Penyaluran Pertama | | 01/BPICAD | 31 Maret | 50.000.000 | 01/BPKAD | 31 Agustus | 40.000.000 | | | |
| | Penyaluran Kedua | | 02/BPKAD | 4 April | 70.000.000 | 02/BPKAD | 4 September | 30.000.000 | | | |
| 3 | DESA C dan setenanya | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | 300.000.000 | | | 180.000.000 | | | 110.000.000 | 290.000.000 | | 96,67% |

..... 2018

Camat

.....

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI LAPORAN RELISASI PENYALURAN DANA ALOKASI DESA DARI RIND ICE RKD

| No. | Uraian |
|-----|---|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Nomor Unit Desa |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SILPA diatas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Alokasi Desa Tahap I |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan jumlah Pagu Dana Alokasi Desa |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Alokasi Desa tahap I |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Alokasi Desa Tahap I |
| 6 | Kolom 6 dual dengan jumlah Dana Alokasi Den Tahap I yang disalurkan |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Alokasi Desa tahap II |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Alokasi Desa Tahap II |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Alokasi Desa Tahap II yang disalurkan |
| 10 | Kolom 10 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Alokasi Desa Tahap I dan Tahap II |
| 11 | Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu Dana Alokasi Desa dengan total penyaluran Dana Alokasi Desa |
| 12 | Kolom 12 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Alokasi Den |


BUPATI KOTABARU,
H. SAYED AFAR

| Kode Returning | Uraian | Uraian Output | Volume Output | Cant Pengadaan | Anggaran Rp | Rencana Penggunaan Tahap I Rp. | Realisasi | | | | Saldo Rp. | Capaian Output | | | Keterangan |
|----------------|---|---------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-----------|----------------|----------|-------|------------|
| | | | | | | | Tahap I Rp. | Tahap II Rp. | Total Rp. | % | | Tahap I | Tahap II | Total | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | | |
| | DESA B | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 2 | list | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 3 1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 3 2 | Dst | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 4 | Bidang Pemberdayatut Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 4 1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 4 2 | Dst | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESA C | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | On | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | | | | | | |

..... 2018

Comet

.....

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CARMAN OUTPUT DANA ALOKASI DESA

| No. | Uraian |
|-----|--|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Desa |
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Alokasi Desa |
| 3 | Kolom 3 dfisi dengan Uraian Output, Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll. |
| 4 | Kolom 4 dfisi dengan Jumlah Volume Output yang terdiri jumlah dan sasaran output. Misal: 500 meter |
| S | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran |
| 7 | Kolom 7 dfial dengan jumlah rencana penggunaan anggaran tahap I |
| 8 | Kolom 8 dfisi dengan jumlah realisasi |
| 9 | Kolom 9 dfisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 10 | Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%. |
| 11 | Kolom 11 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) |

Catatan :

- Untuk Penyaluran Dana Alokasi Desa Tahap I dfisi kolom 1 s/d 7 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Alokasi Den Tahap I sebesar 50%

PARAF KOORDINAS1


BUPATI KOTABARU
H. BAYED JAFAR

| No | Nama /Jumlah | | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Retribuair Daerah Untuk Desa | Bagi Basil Pajak Daerah Untuk Desa | Dana Alokasi Desa | 60%, 50%, 40% dan 30% dart ADD untuk Siltap | Ket |
|-------|----------------------------|--|--|---|--|--|--|-----|
| | Kecamatan | Desa | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.14+5+61 | 8 | 9 |
| 19 | Pamukan Beret | 1 SENGAYAM 2 MAVANO SARI 3 MARGAJAYA 4 MANOKA 5 BATUAH | 814.194.888,00 501.046.141,00 466.071.090,00 680.501.875,00 1.029.737.430,00 | 14.105.274,00 8.586.617,00 8.669.617,00 11.308.115,00 21.016.900,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 844.714.162,00 526.046.758,00 491.154.707,00 708.223.990,00 1.067.168.330,00 | 366.387.699,60 250.523.070,50 279.642.654,00 340.250.937,50 308.921.229,00 | |
| 20 | Pulau Laut Kepulauan | 1 TANJUNG IALAK UTARA 2 TANJUNO LALAK SELATAN 3 PULAU KERAYAAN 4 KERAYAAN UTARA 5 PULAU KERASINAN 6 PULAU KERUMPATAN 7 TELUK ARU 8 TELUK KEMUNING 2 OKA-OKA | 629.011.135,00 741.059.992,00 773.463.857,00 899.993.911,00 1.130.701.698,00 873.404.360,00 636.676.498,00 829.453.926,00 567.610.487,00 | 12.120.851,00 15.094.781,00 15.871.750,00 19.197.559,00 23.552.504,00 18.908.620,00 12.994.193,00 17.122.004,00 11.799.431,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 657.545.986,00 772.568.773,00 805.749.607,00 935.605.470,00 1.170.668.202,00 908.726.980,00 666.084.691,00 862.989.930,00 595.823.918,00 | 314.505.567,50 333.476.996,40 348.058.735,65 404.997.259,95 339.210.509,40 393.031.962,00 318.338.249,00 373.254.266,70 283.805.243,50 | |
| 21 | Pulau Laut Taniung Selavar | 1 TANJUNO PELAYAR 2 TANJUNG SUNGICAI 3 TANJUNG TENGAH 4 TANJUNG KUNYIT 5 TELUK TAM WANG 6 GOSONG PANJANG 7 KAMPUNG BARU 8 TATA MEKAR 9 BANDAR RAYA 10 BANGUN REJO | 599.084.611,00 757.021.741,00 660.288.146,00 466.817.620,00 568.818.971,00 479.280.782,00 609.500.853,00 425.262.003,00 470.972.086,00 446.903.214,00 | 11.939.991,00 15.706.343,00 13.481.100,00 9.748.455,00 11.107.542,00 9.403.621,00 11.976.652,00 8.283.283,00 9.554.604,00 8.663.444,00 | 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 | 627.438.601,00 789.142.084,00 690.183.246,00 492.980.075,00 596.340.513,00 505.098.403,00 637.891.505,00 449.959.286,00 496.940.690,00 471.980.658,00 | 299.542.305,00 340.659.783,45 330.144.073,00 280.090.572,00 284.409.485,50 287.568.469,20 304.750.426,50 255.157.201,80 282.583.251,60 268.141.928,40 | |
| TOTAL | | | 111.631.736.148 | 2.100.000.000 | 3.249.972.000 | 116.981.708.148 | 57.147.214.105 | |

PARAF KOORDINATOR

4 WAKIL BUPATI KOTABARU,

H. SA D JAFAR